

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Krisis pengungsi bukanlah kasus yang baru di dunia. Sebelumnya, pada Perang Dunia II (1940-1945), lebih dari 40 juta manusia mengungsi untuk bertahan hidup (DePillis, Saluja, & Lu, 2015). Orang – orang tersebut tidak memiliki pilihan lain selain mengungsi ke wilayah lain. Hal ini dikarenakan jika diam di wilayah asalnya, maka keselamatan mereka akan terancam.

Krisis pengungsi tidak berhenti di Perang Dunia II saja, namun krisis tetap ada dengan sebab berbeda. Misalnya, konflik Rusia, Ukraina, dan Belarus (1948-1950) yang memaksa 1 juta orang untuk menjadi pengungsi. Lalu, juga ada konflik pemisahan India-Pakistan tahun 1947 yang mendorong 14 juta orang untuk mengungsi.

Banyaknya kasus pengungsi menjadikan PBB menginisiasi sebuah konvensi berkaitan dengan pengungsi. PBB membawa isu ini untuk diperbincangkan di sidang umum PBB. Konvensi pertama mengenai pengungsi adalah *Refugee Convention* 1951 yang mencetuskan pendirian UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Menurut konvensi tersebut, pengungsi adalah orang yang tidak mampu atau tidak bisa untuk kembali ke negara asalnya karena adanya ancaman keselamatan jika kembali. Konvensi ini juga berisi hak-hak yang harus

dipenuhi negara dalam menangani pengungsi. Lalu, pada perkembangannya, isu pengungsi dikembangkan lagi dengan adanya *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 (New York Protocol)* yang merevisi beberapa hal dari konvensi sebelumnya.

Hongaria merupakan salah satu *states parties* dari *Refugee Convention 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 (New York Protocol)*. Hongaria menjadi *states parties* keduanya pada tanggal 14 Maret 1989 (UNHCR, State Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol, 2015). Sehingga, menjadi Hongaria *state parties* atas dokumen *Refugee Convention 1951* dan *Protocol Relating to the Status of Refugees 1967 (New York Protocol)*, maka Hongaria menjunjung hak-hak pengungsi juga perlindungan terhadap pengungsi.

Hongaria mendukung kedua dokumen tersebut, maka Hongaria juga mengakui badan yang terbentuk oleh *Refugee Convention 1951*, yaitu UNHCR. UNHCR tidak hanya memberi bantuan kepada pengungsi dengan memberikan kebutuhan pokok, namun juga memberikan perlindungan terhadap pengungsi, disamping perlindungan dari negara penerima. UNHCR juga mempromosikan integrasi pengungsi dengan masyarakat negara penerima. Hongaria sendiri merupakan pusat UNHCR untuk wilayah Eropa Tengah.

Perang Yugoslavia tahun 1991-1995 menyebabkan 2,3 juta masyarakat Yugoslavia mengungsi untuk mencari tempat aman (Kamm, 1992). Hongaria menerima pengungsi perang Yugoslavia dengan tangan terbuka. Hongaria menerima lebih dari 60.000 pengungsi yang mengungsi dari Yugoslavia (Kamm,

1992). Bahkan pengungsi Yugoslavia memiliki hak untuk mendapat kesejahteraan dan bekerja di Hongaria (Klenner & Szép, 2010). Selain itu, pemerintah Hongaria memberikan kewarganegaraan Hongaria terhadap pengungsi ketika tinggal legal di Hongaria minimal 3 tahun (Klenner & Szép, 2010). Padahal, kondisi saat itu, negara – negara lain memberikan status kewarganegaraan setidaknya 8 tahun tinggal secara legal.

Selain itu, Hongaria terpilih menjadi bagian dari Komite Eksekutif UNHCR pada tahun 1992 (UNHCR, Observations on the situation of asylum-seeker and refugees in Hungary, 2012). Maka, dari sini dapat dilihat bahwa Hongaria menjadi salah satu negara yang cukup peduli dengan kasus pengungsi. Sehingga, terlihat bahwa peran Hongaria mengenai kasus pengungsi cukup dominan, terutama wilayah Eropa.

Hongaria juga tergabung dalam organisasi regional, Uni Eropa tahun 2004. Uni Eropa memiliki prinsip kebebasan, solidaritas, demokrasi, kesetaraan, martabat manusia, serta hak asasi manusia sebagai basisnya. Sehingga, Uni Eropa juga merupakan institusi yang menjunjung hak-hak pengungsi. Hal ini dibuktikan dengan Uni Eropa yang meratifikasi *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*).

Berbagai masalah di Timur Tengah menjadikan banyak orang mengungsi ke Eropa. Berbondong-bondongnya pengungsi ke Eropa menjadikan masalah baru, terutama bagi Uni Eropa. Hal ini dikarenakan saking banyaknya para pengungsi yang harus dikoordinir. Hongaria menjadi salah satu negara tujuan para pengungsi. Pertimbangan para pengungsi Timur Tengah banyak ke Hongaria

karena negara tersebut relatif stabil dan aman. Terlebih lagi, Hongaria adalah negara maju yang akan dianggap mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi pengungsi Timur Tengah. Banyak pihak yang berpendapat bahwa para pengungsi tersebut harus dibantu dengan memberikan tempat tinggal sementara karena para pengungsi telah menderita oleh konflik di Timur Tengah yang tidak selesai.

Data dari UN Refugee Agency menyebutkan bahwa pada tahun 2016 pengungsi dan migran yang data ke Eropa melalui laut Mediterania lebih dari 300.000 jiwa (Clayton, Over 300.000 refugees and migrants cross Med so far in 2016, 2016). Tahun sebelumnya, 2015, pengungsi dan migran yang datang ke Eropa mencapai lebih dari 1 juta jiwa melauai laut, sedangkan lebih dari 34.900 melalui darat (Clayton & Holland, Over one million sea arrivals reach Europe in 2015, 2015). Hal ini cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2014 dimana para pengungsi dan migran yang datang sekitar 280.000 melewati jalur darat maupun laut (BBC, Migrant Crisis: Migration to Europe Explained in seven charts, 2016).

Uni Eropa melihat krisis pengungsipun turun tangan dalam menghadapinya. Uni Eropa mengeluarkan Council Decision (EU) 2015/1523 (European Council, 2015). Isi dari keputusan itu adalah membagi beban pengungsi secara merata ke seluruh negara di Uni Eropa sesuai dengan kondisi kemakmuran dan ekonomi setiap negara. Uni Eropa juga meminta bekerja sama dengan UNHCR dalam implementasi kebijakan ini. Demi menguatkan keputusan ini, Uni Eropa juga memberikan sanksi kepada negara yang menolak implementasi dari keputusan ini. Sanksi yang diberikan Uni Eropa adalah denda sebesar €250,000 setiap negara

yang menolak pengungsi (Holehouse, 2016).

Pada kenyataannya, Hongaria, sebagai anggota Uni Eropa menolak proposal dari Uni Eropa yang mana membagi kuota setiap negara untuk menerima pengungsi Timur Tengah yang masuk ke Uni Eropa. Péter Szijjártó, Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria menyebutkan bahwa rencana ini tidak realistis (The Telegraph, 2015). Szijjártó menambahkan bahwa kebijakan ini malah akan menjadi makin banyaknya pengungsi Timur Tengah yang ke negara-negara Uni Eropa, bukan keputusan yang solutif. Hal ini cukup mengejutkan melihat sebelumnya Hongaria cukup pro terhadap pengungsi.

Victor Orbán, Perdana Menteri Hongaria, pada pertengahan 2015 melakukan kebijakan membangun pembatas di daerah perbatasannya agar menghindari para pengungsi Timur Tengah untuk masuk ke Hongaria secara ilegal. Pembatas tersebut terbuat dari gulungan kawat berduri dengan tinggi sepuluh kaki. Negara pertama yang menjadi prioritas Hongaria dalam pembangunan pembatas ini adalah Serbia melihat banyaknya pengungsi Timur Tengah yang datang dari jalur Serbia. Pembatas antara Serbia dan Hongaria yang dibangun Hongaria ini sepanjang 109 mil (175 km) (Taylor, Map : Europe is building more fences to keep people out, 2015).

Selain itu, Hongaria juga menyiapkan ribuan polisi berjaga di area perbatasan. Hongaria juga tidak akan segan-segan menghukum para pengungsi yang nekat melewati perbatasan tanpa izin serta merusak pembatas dengan hukuman 4 tahun penjara (BBC, Hungary sends police to deter migrants on Serbia border, 2015).

Sikap keras Hongaria terhadap para pengungsi ini menjadikan pertanyaan

mengingat pengungsi merupakan pihak yang harus dilindungi. Hal ini berkaitan dengan sikap Hongaria yang awalnya pro terhadap pengungsi, terlihat dari Hongaria yang meratifikasi *Refugee Convention* 1951 dan *Protocol Relating to the Status of Refugees* 1967 (*New York Protocol*).

Hongaria sebelumnya pada Perang Yugoslavia juga menerima pengungsi Yugoslavia dengan tangan terbuka. Namun, hal ini cukup kontras dengan kasus pengungsi Timur Tengah dimana Hongaria menolak. Hongaria pasti memiliki alasan terhadap sikap anti-pengungsi yang dilakukannya. Maka, dari skripsi ini akan dibahas mengenai alasan-alasan Hongaria yang mendasari kebijakan anti-pengungsi Timur Tengah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah Hongaria menolak pengungsi Timur Tengah?

C. Kerangka Berpikir

1. Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme merupakan teori yang hadir pasca Perang Dingin runtuh. Hal ini dikarenakan teori – teori sebelumnya hanya terpaku pada materialisme dan rasionalisme. Materialisme menolak tentang adanya ide, norma, dan nilai, serta rasionalisme tidak mengakui bahwa aspek sosial merupakan salah satu strategi dan menolak identitas.

Definisi:

a. Nilai

Definisi konseptual : nilai merupakan suatu pemikiran tentang apa yang baik serta sebaik apakah itu dalam kehidupan (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2016). Maka, nilai masih merupakan ide dalam pikiran akan hal-hal apa yang baik dalam kehidupan.

Definisi operasional : Salah satu nilai Islam yang dijunjung oleh masyarakat Arab adalah nilai kehormatan yang menjunjung martabat manusia. Salah satu bentuk menjaga nilai kehormatan adalah dengan berpakaian pantas dan menutup bagian tubuh yang tidak seharusnya terlihat.

b. Norma

Definisi konseptual : norma merupakan batasan perilaku yang diterima dan tidak diterima dalam masyarakat (Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2011).

Definisi operasional : Bentuk norma dari nilai kehormatan adalah wanita menutup semua bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan pria menutup bagian tubuhnya dari pusar ke lutut. Pakaian yang seharusnya menutup bagian tubuh tersebut tidak boleh transparan dan membentuk tubuh. Maka, berpakaian yang tidak mengikuti aturan tersebut merupakan hal yang salah.

c. Budaya

Definisi konseptual : Budaya adalah kesatuan dari tradisi, sistem kepercayaan, dan perilaku. Budaya terbentuk dari banyak faktor,

diantaranya sejarah, agama, identitas etnik, bahasa, dan nasionalitas (Salmoni & Holmes-Eber, 2008).

Definisi operasional : Nilai kehormatan dan aturan berpakaian menjadi suatu kebiasaan masyarakat Arab. Maka, budaya berpakaian di Arab adalah berpakaian yang menutup aurat (bagian yang tidak seharusnya terlihat). Hal ini terlihat dengan wanita Arab yang banyak memakai gamis, bahkan beberapa menggunakan cadar untuk menutupi sebagian muka. Sedangkan, pria Arab banyak yang memakai Thawb (gamis pria Arab).

Nilai, norma, dan budaya sangat berhubungan, tanpa sebuah nilai tidak akan ada sebuah norma, tanpa nilai dan norma tidak ada budaya. Hal ini berkaitan dengan norma yang merupakan sebuah aksi nyata dari nilai yang hanya tertanam di pikiran. Lalu, nilai dan norma yang tertanam dalam sebuah masyarakat akan berkembang menjadi budaya. Pada akhirnya, budaya ini akan menjadi sebuah identitas dalam suatu kelompok masyarakat.

constructivists argue that systems of shared ideas, beliefs and values also have structural characteristics, and that they exert a powerful influence on social and political action. (Reus-Smit, 2005).

Konstruktivis mengungkapkan bahwa struktur sosial yang membentuk perilaku sosial dan politik aktor, baik itu individu maupun negara. Konstruktivis menekankan bahwa norma dan ide sama pentingnya dengan struktur material. Hal ini karena struktur sosial, termasuk nilai, norma, dan

identitas, membentuk aksi yang dilakukan aktor. Material lebih kepada aksi dari aktor, sedangkan yang mempengaruhi keputusan melakukan aksi itu adalah identitas yang dianut.

Struktur normatif dan ide membentuk identitas dan kepentingan aktor dengan tiga mekanisme: *imagination*, *communication*, *constraint*. *Imagination* merupakan keadaan bagaimana aktor bersikap, apa saja batasan – batasan dalam bersikap, serta strategi yang aktor bayangkan. Sedangkan *communication* merupakan bagaimana aktor membenarkan perbuatan yang dia buat. Hal ini dapat dengan membuat aturan yang melegitimasi perbuatannya. Lalu, *constraint* adalah pemaksaan dimana perbuatan aktor memiliki paksaan moral untuk sesuai dengan konteks sosial.

Ted Hoft dan Peter J. Katzenstein menekankan bahwa perilaku negara terkonstruksi dalam nilai dan norma domestik negara. Negara dipandang sebagai aktor sosial yang memiliki identitas (Katzenstein, 1996). Identitas suatu negara dalam politik dunia adalah sedikit banyaknya merupakan kebiasaan sosial yang merupakan identitas dalam rumah (Hofp, 1998). Identitas tersebut terkonstruksikan dari nilai – nilai yang dianggap benar di dalam negara tersebut. Internalisasi nilai dan norma oleh aktor memberikan standar kebenaran dari segala aspek dalam hidup, seperti ekonomi, politik, aktivitas budaya. Lalu, dari interaksi – interaksi sosial tersebut akan menjadi struktur sosial. Maka, konstruktivis mampu menjelaskan bagaimana perkembangan dari norma dan identitas tersebut dalam fenomena politik internasional.

Kebijakan luar negeri tidak hanya merupakan respon dari situasi yang terjadi, namun juga harus di terima di dalam rumah sendiri (Breuning, 2007). Maksudnya adalah pembuat keputusan suatu negara tidak hanya mempertimbangkan kebijakan apa yang baik dalam menangani suatu kasus, tetapi juga mengevaluasi dari kondisi domestik. Ketika pemerintah melakukan kebijakan di luar nilai dan norma masyarakat domestik, maka masyarakat domestik akan menolak serta memaksa pemerintah menuruti nilai dan norma yang diterima oleh masyarakat domestiknya.

Values and beliefs provide a “guiding constraint” on problem representation, as well as other aspects of thought and the use of information in foreign policy decision making (Breuning, 2007).

Nilai dan norma yang terkonstruksikan di suatu masyarakat tersebut menjadi kebenaran umum, sehingga mau tidak mau menjadikannya dasar tindakan dalam perumusan kebijakan luar negeri.

Hongaria bukan negara Kristen, namun Hongaria memiliki pengaruh kekristenan yang kuat. Pengaruh Kristen di Hongaria sudah ada sejak tahun 800-an. Misionaris baik dari Roma maupun dari Bizantium datang dengan membawa nilai – nilai kekristenan di Hongaria secara damai. Masyarakat Hongaria menerima dengan baik ajaran Kristen, terlihat dengan pesatnya perkembangan agama Kristen di Hongaria. Ini mengantarkan Hongaria pada tahun 1000, ketika masih berbentuk kerajaan, menyatakan sebagai kerajaan Kristen Katolik (Barany, Berend, Macartney, Vardy, & Várdy, 2016).

Sehingga, sistem pemerintahan serta aturan-aturan berdasarkan hukum agama Kristen Katolik.

Pengaruh Kristen tidak hanya berkembang pesat di Hongaria, namun juga di Eropa. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya kerajaan Kristen di Eropa, seperti Kerajaan Roma, Kerajaan Perancis, Kerajaan Polandia, dan masih banyak lagi. Perkembangan pesat Kristen di Eropa menjadi pengaruh kuat dalam perkembangan budaya Eropa. Hal ini berkaitan dengan nilai dan norma yang diterima oleh masyarakat Eropa tersebut pada akhirnya menjadi panutan hidup. Lalu, lebih jauh lagi nilai dan norma Kristen menjadi kunci dari peradaban Eropa.

Perang Yugoslavia tahun 1991-1995 menyebabkan banyak pengungsi mengungsi ke Hongaria. Hal ini dikarenakan letak Hongaria yang bersebelahan dengan Yugoslavia. Disamping itu, Yugoslavia juga memiliki nilai, norma, serta budaya yang tidak jauh berbeda dengan Hongaria. Yugoslavia yang merupakan bagian dalam peradaban Eropa dan mayoritas masyarakatnya beragama Kristen, begitupula dengan Hongaria yang bagian dari peradaban Eropa dan mayoritas masyarakatnya beragama Kristen. Sehingga, Hongaria menerima pengungsi perang Yugoslavia dengan tangan terbuka dikarenakan kesamaan nilai, norma, dan budaya.

Namun, respon terhadap pengungsi pada pengungsi Timur Tengah cukup berbeda. Hongaria menolak pengungsi Timur Tengah. Pengungsi Timur Tengah membawa nilai, norma, dan budaya Arab dan Islam. Data tahun 2011 menyebutkan 54,1% penduduk Hongaria mengaku menganut agama Kristen

(Barany, Berend, Macartney, Vardy, & Várdy, 2016). Hal ini membuktikan bahwa nilai dan norma Kristen masih mendominasi di masyarakat Hongaria.

Pengungsi Timur Tengah memiliki nilai kebebasan yang dibatasi oleh Al-Qur'an dan Hadist, misalnya adanya batasan dalam berpakaian. Hal ini berkaitan dengan martabat manusia yang harus dijaga dengan berpakaian yang pantas. Sehingga, berpakaian tertutup menjadi berbudaya di Timur Tengah. Bagi wanita, menutup semua tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan dan bagi pria menutup bagian tubuh pusar hingga lutut. Hal ini berbeda dengan masyarakat Hongaria tidak memiliki aturan dalam berpakaian. Ini berkaitan dengan Hongaria yang mengapresiasi nilai kebebasan karena menghargai kebebasan merupakan bentuk menghargai martabat manusia. Hal ini berkaitan dengan ajaran agama Kristen yang mengajarkan kebebasan merupakan tanggung jawab terhadap Tuhan. Sehingga, kebebasan tidak dibatasi selama tidak bersinggungan dengan kebebasan pihak lain.

Masyarakat Arab juga memiliki nilai keadilan tentang pria yang seharusnya memimpin wanita yang tertuang dalam ajaran Islam. Sehingga, pria dianggap pihak yang berkuasa dan berhak mengatur wanita. Hal ini berbeda dengan masyarakat Eropa, termasuk Hongaria yang memiliki nilai keadilan bahwa wanita dan pria memiliki derajat yang sama. Wanita dianggap memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan pria di Eropa, termasuk Hongaria. Nilai ini berkembang menjadi budaya *ladies first* seperti mempersilahkan wanita untuk jalan duluan serta pria yang membawakan

barang untuk wanita.

Budaya Eropa yang merupakan perpanjangan tangan dari nilai dan norma Kristen cukup berbeda dengan budaya Arab yang sedikit banyak terkonstruksi dari nilai dan norma Islam. Maka, Hongaria merasa bahwa pengungsi Timur Tengah memiliki identitas yang berbeda. Perbedaan itu merupakan ancaman bagi Hongaria akan identitasnya. Hongaria lalu merespon pengungsi Timur Tengah dengan melakukan penolakan. Bentuk penolakan Hongaria adalah dengan pembangunan tembok pembatas guna menghalangi pengungsi masuk. Selain itu, Hongaria menolak proposal Uni Eropa dalam pembagian kuota pengungsi.

Mekanisme struktur dan ide *imagination* Hongaria adalah anti pengungsi Timur Tengah. *Communication* yang dilakukan Hongaria adalah dengan membuat aturan anti-pengungsi, seperti pembangunan tembok pembatas. Sedangkan *constraint* dari Hongaria adalah paksaan untuk patuh dari peraturan yang dibuat untuk menolak pengungsi Timur Tengah.

Maka kasus penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah disebabkan karena nilai, norma, budaya yang berbeda. Maka, dari perbedaan itu, identitas pengungsi Timur Tengah menjadi berbeda dengan identitas masyarakat Hongaria. Norma dan identitas yang terstruktur dan terkonstruksi menjadikan hal tersebut standar nilai Hongaria. Standar nilai tersebut menjadi hal yang dianggap benar dan penting untuk diperjuangkan oleh masyarakat Hongaria. Maka, dari sanalah kebijakan Hongaria dirangkum.

D. Hipotesis

1. Hongaria dengan pengungsi Timur Tengah memiliki nilai kebebasan dan nilai keadilan yang berbeda.
2. Perbedaan nilai yang dianut Hongaria dan pengungsi Timur Tengah menjadi sebuah ancaman identitas Hongaria, maka Hongaria menolak pengungsi Timur Tengah

E. Tujuan Penulisan

1. Adanya kesesuaian isu dengan studi Hubungan Internasional, dalam hal ini bagaimana dengan adanya aktor *non-state*, yaitu pengungsi mampu mempengaruhi kebijakan Hongaria
2. Tujuan dari penulisan karya tulis ini untuk membuktikan adanya pengaruh nilai dan norma yang dianut Hongaria dalam kebijakan luar negerinya
3. Tujuan dari penulisan karya tulis ini untuk menjawab alasan dibalik penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian dari karya tulis ini adalah kebijakan luar negeri dari Hongaria dengan batasan studi kasus krisis pengungsi Timur Tengah tahun 2014-2016.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dari skripsi ini adalah kualitatif yang bersifat eksplanatif. Penelitian kualitatif yang bersifat eksplanatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menerangkan, menguji hipotesis, dari variabel-variabel penelitian.

Penelitian kualitatif dengan pola eksplanatif yang dilakukan bermaksud menjelaskan sebab – sebab dari ketidaksesuaian fakta dengan normatif yang ada. Maka, dalam hal ini, bermaksud membuat karya tulis yang mampu menjelaskan alasan penolakan Hongaria terhadap masuknya pengungsi Timur Tengah ke Hongaria.

Data-data yang diperoleh dalam penulisan karya tulis melalui studi pustaka. Melalui studi pustaka, diperoleh landasan teori serta data-data sekunder yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah. Data-data sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku literatur, artikel-artikel di internet, serta tulisan lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan penyusunan karya tulis yang teratur dan sistematis, maka secara keseluruhan penulis membagi penulisan karya tulis ini ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan bab yang memuat latar belakang masalah mengenai penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah, rumusan masalah, landasan teori, hipotesa, metodologi penelitian, dan sistematikan penulisan.

Bab II membahas tentang kebijakan luar negeri Hongaria secara umum. Lalu bab ini juga menjelaskan tentang kebijakan Uni Eropa dan Hongaria terhadap pengungsi.

Bab III membahas mengenai faktor – faktor yang menyebabkan pengungsi Timur Tengah mengungsi ke Eropa, terutama ke Hongaria. Lalu, bab ini juga

menjelaskan karakteristik dari pengungsi Timur Tengah. Bab ini juga membahas mengenai sikap dan kebijakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah.

Bab IV menjelaskan tentang budaya serta karakter Hongaria. Bab ini menjelaskan juga tentang persepsi masyarakat Hongaria terhadap pengungsi. Lalu, bab ini menjelaskan alasan penolakan Hongaria terhadap pengungsi Timur Tengah. Bab ini juga membuktikan bahwa nilai dan norma merupakan sebagai dasar dari kebijakan luar negeri Hongaria. Bab ini sebagai pembuktian akan hipotesis yang telah disusun dengan kenyataan lapangan yang terjadi di Hongaria.

Bab V merupakan bab akhir yang akan menutup karya tulis ini, berisi rangkuman dari bab sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.